

Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu dalam Riset dan Inovasi Pembangunan Daya Saing Daerah

¹Ati Apriani Yusuf, ²Hasan Muhamad

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung,

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu, Alumni Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung

e-mail : yusuf.alia18@yahoo.com, hasanmuhamad@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah, dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan *purposive sampling* untuk menentukan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu kurang maksimal. Adapun faktor penghambat kinerja tersebut antara lain masih kurangnya fungsional peneliti sehingga memerlukan pihak akademisi sebagai tenaga ahli, kemudian masih kurangnya kebijakan yang mengatur masalah penggunaan metodologi penelitian yang tepat, sehingga hasil riset dan inovasi selama ini kurang efektif diaplikasikan untuk pengembangan daya saing daerah. Selain itu aspek penghambat lainnya adalah belum adanya riset yang bersifat kolaboratif dan partisipatif, dan kurangnya transparansi hasil penelitian sebagai pembuka peluang investasi pihak luar.

Kata Kunci: Kinerja; Riset dan Inovasi; Daya Saing Daerah

The Performance of Palu City Regional Research and Development Agency in the Research and Innovation of the Regional Competitiveness Development

Abstract

This study aims to examine the performance of the Palu City Regional Research and Development Agency in the research and innovation of the development of regional competitiveness, and determine the inhibiting factors. The study was conducted by applying qualitative descriptive research type, while informants were collected purposively. The results show that the performance of the Palu City Regional Research and Development Agency was not optimal. The investigation found that the lack of researchers in the agency that resulted additional researchers from university's academic staffs as experts, and the lack of policies regarding research methodology that resulted the application of research and innovation are less effective, are the inhibiting factors. Further, two others were emerged as well as obstacles; they are the lack of collaborative and participatory research, and the lack of transparency of the research results which may act as the data for investors or an investment opportunity.

Keywords: Performance; Research and Innovation; Regional Competitiveness

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan wewenang pada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga setiap daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pembangunan melalui inovasi, serta menciptakan tata kelola ekonomi daerah yang lebih kompetitif dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menegaskan bahwa dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global diperlukan dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas untuk mendukung daya saing daerah secara global.

Pentingnya peningkatan daya saing daerah tersebut lebih diutamakan pada daerah-daerah berkembang seperti halnya Kota Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kota Palu kemudian memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan pembangunan daya saing daerah dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah terkait riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah. Inovasi menjadi bagian yang penting dalam mendukung peningkatan daya saing Indonesia yang merupakan akumulasi dari daya saing regional di dalam negeri atau daerah. Riset dan inovasi merupakan salah satu harapan untuk meraih keberhasilan suatu daerah. Basis pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam tentunya akan semakin terkikis oleh waktu. Sebaliknya, riset dan inovasi jika semakin digunakan maka semakin berkembang.

Dinamika perubahan kebijakan pada tingkat nasional telah memberikan *impact* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut dibutuhkan seperangkat kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing daerah, selain

memperkuat kinerja kelembagaan dan pemerintahan daerah. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi, semakin tinggi kinerja organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Konteks organisasi publik dalam hal ini pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu, titik temu pengukuran kinerja organisasi berada pada tingkat pemenuhan referensi hasil penelitian dan inovasi sebagai dasar pembangunan daya saing daerah.

Permasalahan klasik terkait kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu antara lain jumlah dan kualitas fungsional peneliti yang rendah berimplikasi pada rendahnya hasil penelitian dan kajian. Kurang memadainya anggaran untuk penelitian dan pengembangan disebabkan oleh kurangnya dukungan dari eksekutif dan legislatif serta rendahnya komitmen pengambil kebijakan perihal penelitian dan pengembangan. Faktor kurangnya pemenuhan sarana prasarana pendukung penelitian seperti ruang diskusi pakar, laboratorium inovasi, perpustakaan, fasilitas komputer dan internet, berdampak pada kurang maksimalnya hasil riset dan inovasi pengembangan yang bernilai tinggi. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat aplikasi hasil penelitian dikarenakan hasil penelitian tersebut dihasilkan oleh pihak ketiga dalam hal ini melibatkan unsur akademisi sebagai tenaga ahli, dimana hasil penelitian tersebut bersifat swakelola, *pure sains* dan lebih sistematis. Masalah lainnya adalah masih kurangnya transparansi dan publikasi hasil penelitian.

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) terkait penelitian ini untuk mengantisipasi adanya kesamaan sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan perbandingan, antara lain: 1) Mohamad Zaenal Arifin, Arif Barata Sakti, 2017, Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah; 2) Sayyid Syekh, 2019, Peran dan Fungsi Litbang dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jambi; 3) Adi Suhendra, 2018, Inovasi Daerah Dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang; dan 4) Mp. Ratminto, 2014, Kinerja Lembaga Litbang Daerah Provinsi NTT: Studi Kasus pada Lembaga Litbang yang telah direstrukturasikan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Adapun kebaruan ilmiah dan perbedaan mendasar penelitian ini adalah pada subjek permasalahan penelitian yaitu kinerja dalam riset dan inovasi pembangunan dari konsep kebijakan, perencanaan dan penganggaran, kualitas, kehematan, keadilan dan pertanggungjawaban sebagaimana Sinambela (2012:192).

Dari uraian latar belakang dan fenomena tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah; dan 2) Apa saja faktor-faktor penghambatnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah serta mengetahui faktor penghambat kinerja tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu sebagai motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan penguatan riset dan inovasi, khususnya di Kota Palu, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengembangan riset dan inovasi. Maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan sebagai *benchmarking* bagi daerah lain.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagaimana Sugiyono (2009:15). Lokasi penelitian ada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu. Penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu menetapkan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dianggap cukup mengetahui masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi akurat, sebagaimana Soehartono (2004:57) sebanyak 13 orang.

Analisis data dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, data kepustakaan, kemudian memformulasikan

secara deskriptif, selanjutnya memproses data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan bagaimana kinerja organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah sebagaimana Miles dan Huberman (1992:53).

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu awal terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu mempunyai program dan kegiatan berupa kelembagaan pemerintahan, aplikasi teknologi dan inovasi, penguatan teknologi, inovasi dan IPTEK, sosial budaya yang ke depannya bisa menghasilkan daerah yang penuh inovasi dan mandiri.

Berdasarkan definisi konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palu dapat dibahas sebagai berikut:

- Kebijakan

Salah satu hal yang menentukan kemajuan suatu bangsa adalah kemajuan bangsa tersebut dalam mengedepankan *research and development* (RnD), yang hasilnya dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi kebijakan. Maka dari itu, banyak negara maju yang menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak dalam menentukan kebijakan. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu menunjukkan bahwa kebijakan maupun aturan main dalam hal pemanfaatan hasil riset dan inovasi masih kurang, selain belum adanya kebijakan yang mengatur metodologi riset dan penelitian. Beberapa hasil penelitian dan riset dari akademisi biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana ketika diterapkan dalam referensi pembangunan tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. Sementara riset dan penelitian yang ideal adalah dengan metode partisipatif, dimana melibatkan juga masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan daya saing daerah.

Perencanaan dan penganggaran

Masalah yang terkait dengan penganggaran adalah kurangnya alokasi dana untuk proses pengambilan data di lapangan. Seringkali

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dalam penyusunan perencanaan telah diusulkan, akan tetapi kembali dimentahkan pada tingkat pembahasan dan asistensi BAPEDDA. Sementara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu, fungsional peneliti masih sangat kurang sehingga diperlukan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli. Pengalaman yang sudah-sudah, penelitian dan pengembangan menggunakan sistem swakelola, dimana perencanaan dan penganggaran diatur oleh lembaga akan tetapi pada pelaksanaannya ditawarkan kepada pihak tenaga ahli dalam hal ini akademisi. Masalah terjadi ketika anggaran yang disusun oleh lembaga dengan pelaksanaan di lapangan sangat berbeda sehingga hasil penelitian kurang maksimal karena adanya keterbatasan dana. Pada sisi lain, akademisi diminta untuk menyusun proposal penelitian, dan ketika selesai disusun dana yang diajukan tidak tersedia, dan seringkali terjadi beberapa penelitian yang dipaksakan untuk dilakukan bukan dari pihak yang mengajukan proposal, sehingga hasil penelitian cenderung tidak maksimal. Sejatinya pihak akademisi dapat selalu dilibatkan terutama dari perencanaan dan penganggaran sehingga dapat memaksimalkan hasil penelitian yang akan dilakukan karena adanya keterlibatan penuh.

Kualitas

Permasalahan utama adalah minimnya peneliti yang ada di Indonesia bahkan di daerah, sementara salah satu ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah tersedianya peneliti. Demikian halnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu masih sangat kurang tenaga fungsional peneliti. Sehingga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia terutama sumber daya manusia fungsional peneliti. Sejatinya dari aspek kualitas dapat lebih disarankan untuk melakukan suatu riset kolaborasi antara akademisi dengan pihak fungsional peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya Kota Palu dengan mengacu pada manfaat bagi fungsional peneliti tersebut dimana terjadi transformasi pengetahuan. Selain itu, hasil riset tersebut dapat diterapkan karena keterlibatan fungsional peneliti dengan kekuatan yang dimilikinya.

Kehematan

Aspek kehematan disini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. terutama dalam kehematan biaya dan dana operasional penelitian. Sangat disayangkan dalam perencanaan yang telah dirumuskan sebelum diasistensi di pihak BAPEDDA Kota Palu telah diusulkan penghematan biaya, diantaranya adalah pengikutsertaan beberapa staf maupun pejabat untuk mengikuti beberapa pelatihan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, akan tetapi usulan cenderung ditolak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu kembali menggunakan tenaga ahli akademisi untuk memenuhi sasaran penelitian. Tentu saja hal tersebut sangat jauh dari segi kehematan biaya maupun saran dan prasarana. Selain itu, masalah lainnya menyangkut prinsip kehematan adalah masih kurangnya sistem insentif untuk memperoleh informasi maupun pengumpulan informan sehingga data maupun referensi informasi masih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

- Keadilan

Prinsip keadilan disini dimaksudkan pada adanya pemerataan manfaat terutama bagi sumber daya manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu. Selain itu, sejatinya hasil riset dan penelitian tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daya saing daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Sehingga aspek keadilan dapat dicapai dengan efektif, selain itu pemerataan peran stakeholders dalam suatu riset kolaborasi tersebut dapat berhasil guna dan bermanfaat secara umum sebagai referensi pembangunan.

Pertanggungjawaban

Merupakan kewajiban organisasi untuk memberikan transparansi dan keterbukaan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam melakukan peningkatan pembangunan daya saing daerah dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi, idealnya adalah ketersediaan data dasar. Mulai dari data statistik sampai dengan hasil-hasil riset yang dilakukan dengan prosedur penelitian berbasis kolaborasi dapat dirumuskan dan dipertanggungjawabkan secara umum sehingga dapat menarik pihak luar untuk melakukan investasi. Dengan adanya investasi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

tersebut tentu saja dapat meningkatkan daya saing daerah dengan membuka peluang bagi orang luar untuk mengembangkan daerah.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Belum adanya kebijakan khususnya yang mengatur ketentuannya metodologi dalam melakukan riset dan penelitian, dalam hal ini sejatinya adalah metode partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran pembangunan; 2) Kurangnya alokasi dana yang khusus untuk proses pengambilan data, masih sangat kurang fungsional peneliti, adanya sistem swakelola, hasil penelitian tenaga ahli kurang efektif diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan karena bersifat *pure sains*, dan sistematis; 3) Belum adanya riset kolaborasi antara akademisi dengan pihak fungsional peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya Kota Palu dengan mengacu pada manfaat bagi fungsional peneliti tersebut dimana terjadi transformasi pengetahuan; 4) Kurangnya dukungan untuk pengikutsertaan beberapa staf maupun pejabat pada beberapa pelatihan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; 5) Kurangnya sistem insentif untuk memperoleh informasi maupun pengumpulan informasi; 7) Kurangnya pemerataan peran *stakeholders* maupun masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Pemerataan tersebut sebenarnya dapat dicapai dengan adanya suatu riset kolaborasi partisipatif yang melibatkan beberapa peran *stakeholders*, akademisi sebagai tenaga ahli dan fungsional peneliti dari badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu, serta masyarakat. Sehingga hasil riset dan inovasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, merata dan berhasil guna; 8) Kurangnya transparansi dan keterbukaan hasil riset dan inovasi tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, dan mengacu pada faktor penghambat yang didapatkan dari uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah

masih kurang maksimal dengan adanya beberapa kendala menyangkut upaya peningkatan pembangunan daya saing daerah. Masalah yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah kurangnya tenaga fungsional peneliti dan masih kurangnya kebijakan yang mengatur tentang metodologi riset dan inovasi tersebut; dan 2) Faktor-faktor penghambat kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam riset dan inovasi pembangunan daya saing daerah adalah belum adanya kebijakan yang berfokus pada metodologi penelitian yang ideal, dimana perlunya adalah riset yang bersifat kolaboratif dan partisipatif sehingga melibatkan berbagai unsur dan masyarakat itu sendiri. Kemudian penghambat lainnya adalah kurangnya tenaga fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu sehingga masih memerlukan tenaga ahli dari akademisi. Persoalan lain timbul dikarenakan hasil riset tersebut merupakan *pure sains* dan sistematis, sehingga kurang dapat diaplikasikan pada perencanaan pembangunan. Kemudian riset maupun inovasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli masih bersifat swakelola, dimana perencanaan dan penganggaran diatur oleh lembaga akan tetapi pada pelaksanaannya ditawarkan kepada pihak tenaga ahli. Masalah terjadi ketika pada penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga memaksa riset dilakukan dengan dana seadanya dan hasilnya kurang maksimal. Kemudian masih kurangnya riset yang bersifat kolaborasi partisipatif, dan kurangnya keterbukaan maupun transparansi hasil riset dan inovasi.

Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka dapat disarankan, sebagai berikut: 1) Perlunya peningkatan kompetensi fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu melalui pelatihan dan pendidikan terkait dengan metodologi penelitian. Selain itu perlunya kebijakan yang mengatur tentang metodologi penelitian tersebut. Kemudian perlunya alokasi dana khusus untuk pemenuhan riset dan inovasi yang idealnya dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan akademisi, fungsional peneliti, *stakeholders*, dan masyarakat sehingga terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan dengan kekuatan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

masing-masing unsur. Dan perlunya transparansi hasil riset dan inovasi terutama data dasar untuk dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga dapat menarik pihak luar untuk berinvestasi; dan 2) Perlunya peranan Pemerintah Kota dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu, terutama dalam hal pemenuhan fungsional peneliti dan dukungan terhadap pengadaan kegiatan riset dan inovasi berbasis kolaboratif dan partisipatif. Selain itu diperlukan peran dan dukungan Pemerintah Kota dalam hal mengaplikasikan hasil riset dan inovasi tersebut dalam pembangunan yang merata, serta mendorong transparansi hasil riset dan onivasi tersebut untuk membuka peluang pihak luar berinvestasi dan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang, Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol 2 (1), p 39-48

REFERENSI

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mohamad Zaenal Arifin, Arif Barata Sakti. 2017. *Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah*, Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama, Universitas Muhamadiyah, Magelang, p 61-72
- Mp. Ratminto. 2014. *Kinerja Lembaga Litbang Daerah Provinsi NTT: Studi Kasus pada Lembaga Litbang yang telah Direstrukturisasi*, Tesis. Yogyakarta: Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada.
- Sayyid Syekh. 2019. *Peran dan Fungsi Litbang dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jambi*, Vol 19 (1), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, p 183-190
- Sinambela, Lijan., 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendra, Adi. 2018. *Inovasi Daerah Dalam*